

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2011-2015**

**JURNAL**



**Oleh**

**Nama : Dedy Tulus Wicaksono**

**NomorMahasiswa : 14313023**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2011-2015**

**Dedy Tulus Wicaksono**

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

(dedytulusw@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembangunan yang diterapkan di negara berkembang umumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Namun belum dapat mengatasi masalah sosial seperti ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks gini merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa besar tingkat ketimpangan antar wilayah. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ketimpangan. sehingga pemerintah memiliki peran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengelola serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi wilayah yang ada sehingga dapat meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Selain itu Pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi terhadap tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan pada tingkat Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita hasilnya positif dan signifikan berpengaruh. Sedangkan pengeluaran pemerintah hasilnya negatif dan signifikan berpengaruh. Namun untuk variabel Jumlah penduduk miskin hasilnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** *Ketimpangan, Indeks Gini, Penduduk miskin, PDRB perKapita, Pengeluaran Pemerintah*

## PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di perlukan pembangunan perekonomian yang merata di suatu negara. namun dalam prosesnya terutama negara berkembang lebih mengutamakan masing-masing daerahnya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Gustav(1977) dalam penelitiannya *trade-off pessimism* menyatakan berdasarkan daftar empiris yang tersedia memperlihatkan adanya suatu konflik yang parah antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Secara garis besar menurut Sadono Sukirno (1985). Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan segala sumber daya yang ada.

Adanya permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut mengindikasikan ada proses yang salah dalam pembangunan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bagaimana peningkatan perekonomian suatu wilayah. Apabila perekonomian itu bekerja dengan baik, maka hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat di nikmati secara adil dan merata bagi seluruh bagi seluruh pelaku ekonomi termasuk masyarakat. Dan bentuk dari peningkatan perekonomian tersebut tercermin langsung oleh pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) tidak mampu memecahkan permasalahan mendasar di negara berkembang, meskipun target pertumbuhan ekonomi telah pertahunnya telah tercapai. a dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.(Todaro & Smith, 2003).

Namun faktanya kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara terutama NSB (Negara Sedang Berkembang) selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada ketimpangan pendapatan. Dalam bukunya Kuncoro menganjurkan NSB menerapkan strategi pertumbuhan dengan distribusi yang artinya NSB tidak hanya memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan distribusi pembangunan tersebut, dapat diwujudkan dengan kombinasi peningkatan kerja, investasi modal manusia, perhatian petani kecil dan sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah. (Kuncoro,1997:12)

Namun ketimpangan pendapatan rupanya mempunyai dua dampak terhadap pembangunan perekonomian daerah, yaitu dampak positif dan dampak negatif, Dampak negatif dari ketimpangan adalah perekonomian yang tidak efisien, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan di pandang tidak adil. Dampak positifnya yaitu merangsang atau mendorong wilayah atau daerah lain untuk bersaing dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat (Todaro,2004)

**Tabel 1.1 PDRB Provinsi di pulau Sulawesi**

PROVINSI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
SULAWESI UTARA	59.910,90	58.677,59	62.442,50	66.359,42	70.418,81
SULAWESI TENGAH	56.833,83	62.259,53	68.219,32	71.676,11	82.829,23
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>185.708.47</b>	<b>202.184,59</b>	<b>217.589.13</b>	<b>233.998.74</b>	<b>250.729.56</b>
SULAWESI TENGGARA	53.546,69	59.785,40	64.268,71	68.290,56	72.988,30
GORONTALO	16.669,09	17.987,07	19.367,57	20.775,70	22.070,45
SULAWESI BARAT	19.027,50	20.786,89	22.227,39	24.200,11	25.983,38

Sumber :Badan Pusat Statistik

Dari data tersebut dapat dinilai jika provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki PDRB tertinggi di pulau Sulawesi. PDRB tersebut mencerminkan pertumbuhan

ekonomi Sulawesi selatan selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun tingginya PDRB sulawesi dibarengi dengan tingkat ketimpangan provinsi yang sangat tinggi. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan Indeks Gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketidak merataan agregat, koefisien gini diambil dari nama ahli statistika italia yang bernama C.Gini yang menemukan rumus tersebut tahun 1912. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (Ketidak merataan sempurna). Koefisien gini ketidak merataan sedang berkisar antara 0,36 – 0,49, ketidak merataan tinggi berkisar 0,50-0,70 dan ketidak merataan rendah berkisar antara 0,20-0,35.(Arsyad,2010:291)

**Tabel 1.2 Rasio Gini Provinsi di pulau Sulawesi**

PROVINSI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
SULAWESI UTARA	0.372	0.4285	0.434	0.43	0.367
SULAWESI TENGAH	0.382	0.3935	0.399	0.362	0.372
<i>SULAWESI SELATAN</i>	<i>0.416</i>	<i>0.414</i>	<i>0.4305</i>	<i>0.4365</i>	<i>0.414</i>
SULAWESI TENGGARA	0.401	0.4035	0.4085	0.404	0.39
SULAWESI BARAT	0.3565	0.325	0.3365	0.365	0.3625
GORONTALO	0.4295	0.425	0.441	0.4325	0.4105

Sumber :Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 tersebut di provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 tahun terakhir memiliki nilai rasio gini sebesar 0,43 tahun 2013, rasio gini sebesar 0,43 ditahun 2014 dan rasio gini sebesar 0,41 di tahun 2015 serta rasio gini sebesar 0,41 di tahun 2016. Dari data tersebut rasio gini Sulawesi Selatan termasuk tinggi dari rata-rata ketimpangan nasional dan tertinggi ke empat setelah provinsi DIY, Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga atas dasar data tersebut provinsi Sulawesi selatan termasuk daerah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas adanya indikasi tentang ketidak merataan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan hasil kajian empiris maka di

perlu penelitian yang lebih mendalam serta komprehensif terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan Di provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor- faktor yang mempengaruhi Ketimpangan tersebut. Maka penelitian tersebut tertarik untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

### **Penelitian Sebelumnya**

Ilham Farih Muhaimin (2014), dalam penelitian yang berjudul Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Hasil dari penelitian ini Inflasi, UMP, Kemiskinan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

Benu Olfie dan Kapatow (2014), dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara. hasil dari penelitian ini variabel Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sementara untuk variabel luas lahan pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara.

Ani Nur Laili (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, variabel Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan di pulau Jawa. Variabel Derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa

### **Landasan Teori**

Ketimpangan adalah mengacu pada standart hidup dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja atau sekelompok golongan tertentu dan tingkat ketimpangan sangat tinggi. (Kuncoro,1997:103)

Lincoln Arsyad berpendapat dalam masalah pemerataan merupakan suatu hal yang sangat kompleks demi mengatasi ketimpangan, karena sering sekali berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pemerataan sebagai suatu tujuan yang bernilai dengan adanya unsur yang erat hubungannya dengan keadilan sosial. Dalam upaya pencapaian pemerataan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Pertama yaitu pendanaan yang diperlukan sangatlah besar, adanya kendala anggaran disebagian NSB (Negara Sedang Berkembang) akan membatasi ruang gerak bagi upaya pengurangan tingkat kesenjangan. Yang kedua yaitu tidak tepat sasaran, disebabkan terbatasnya interaksi anantara pedesaan dan sektor informal dimana merupakan representasi golongan miskin dengan institusi formal misalnya pemerintah, dan yang ketiga adanya hambatan politik, dimana masyarakat golongan berpendapatan rendah seringkali memiliki kekuatan politik yang kecil dari pada golongan masyarakat berpendapatan tinggi. (Arsyad,2010:284)

Adelman dan Moris mengemukakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di NSB yaitu penambahan penduduk yang tinggi, inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti oleh secara proposional penambahan produksi barang-barang, investasi yang sangat banyak dalam proyek padat modal (capital intensive) sehingga persentase pendapatan dari modal

lebih besar daripada yang berasal dari pekerjaan sehingga angka pengangguran bertambah, dan memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat adanya ketidakelestarian permintaan terhadap barang-barang NSB.(Arsyad,2010:284)

## METODE PENELITIAN

Data penelitian ini menggunakan regresi data panel. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Jumlah penduduk miskin, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita, dan pengeluaran pemerintah. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan diperoleh di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk), dan situs pemerintahan lain. Penelitian ini dilakukan kepada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Periode penelitian ini dari tahun 2011-2015. Analisis data panel dalam penelitian ini memiliki model persamaan sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan

X<sub>1</sub> = Jumlah penduduk miskin (ribuan)

X<sub>2</sub> = PDRB Perkapita (miliar rupiah)

X<sub>3</sub> = Pengeluaran pemerintah (miliar rupiah)

$\beta_0$  = *Intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi

i = Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

t = Periode Waktu

e = Error Term

### Pengujian data Panel

Dari ketiga pengujian model regresi *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* dilakukan pengujian untuk menentukan estimasi model regresi yang paling tepat, berikut uji analisis yang dilakukan:



## Uji Chow Test

Uji *chow test* digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah model yang tepat, dilakukan dengan membandingkan antara model regresi *common effect* atau lebih baik menggunakan *fixed effect*. Untuk mengetahuinya dengan melihat uji F-statistik.

### Hasil Pengujian Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1234.860267	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	686.985230	23	0.0000

Sumber :Pengolahan data dengan Eviews 9

Dari hasil pengujian *chow test* didapatkan hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 686.985230 dengan probabilitas  $0.0000 < \alpha 5\%$ . Sehingga secara statistik menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Maka menurut estimasi model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

## Uji Hausmen Test

Uji *hausmen test* digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah model yang akan dengan membandingkan antara model regresi *random effect* atau lebih baik menggunakan *fixed effect*. Untuk mengetahuinya dengan melihat uji *chi-squared*:

$H_0 = \text{random effect model}$  lebih baik dari pada *fixed effect model*

$H_a = \text{fixed effect model}$  lebih baik dari pada *random effect model*

Taraf signifikan  $\alpha = 5\%$  (0,05)

Dalam pengambilan keputusan uji *langrangge multiplier* bisa dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan  $< (\alpha = 5\%)$  maka model regresi yang dipilih adalah *fixed effect*. namun apabila *p-value* tidak signifikan  $> (\alpha = 5\%)$  maka model regresi yang dipilih adalah *random effect*.

### Hasil Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.603866	3	0.0000

*Sumber: pengolahan data dengan Eviews 9*

Dari hasil pengujian *hausman test* didapatkan hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 27.603866 dengan probabilitas  $0.0004 < \alpha 5\%$ . Sehingga secara statistik menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Maka menurut estimasi model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

### Evaluasi Hasil Regresi

Dari pengujian untuk menentukan mana model yang paling tepat dalam uji penelitian ini adalah mode *fixed effect*. Maka dalam mengetahui lebih lanjut mengevaluasi hasil regresi digunakan beberapa test yaitu uji kebaikan garis regresi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji F) dan uji signifikansi (uji t).

**Tabel 1.5**  
**Hasil Uji Eviews Model *Fixed***

Variabel	Koefisien	t-statitic	Prob
LOG X1	0.005488	0.506669	0.6136
LOG X2	0.091098	6.464259	0.0000
LOG X3	-0.038443	-6.394190	0.0000
C	0.035773		
R= 0.998509		F-statistic= 2395.546	

*Sumber: olah data dengan Eviews 9*

### Uji kebaikan Garis Regresi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  sebesar 0,998509 yang berarti bahwa sebanyak 99,85% dimana variasi variabel independen (Jumlah penduduk miskin, PDRB, dan Pengeluaran pemerintah.) dapat menjelaskan kedekatan dengan garis regresi pada variabel dependen (Ketimpangan distribusi pendapatan). Sedangkan sisanya sebesar 0,15% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji data panel dengan model regresi model *fixed effect* memperoleh nilai F-statistik sebesar 2395.546 dan nilai probabilitas sebesar 0.000000 ( $< \alpha$  5%). Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara estimasi *fixed effect*. Keseluruhan variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### Uji variabel secara individu (Uji T)

#### Hasil Statistik t-hitung

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistik	Probabilitas
LOG(X1)	0.005488	0.010831	0.506669	0.6136
LOG(X2)	0.091098	0.014093	6.464259	0.0000
LOG(X3)	-0.038443	0.006012	-6.394190	0.0000

Sumber: data olah Eviews 9

Pengujian terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Koefisien variabel jumlah penduduk miskin adalah 0.005488 dengan t-statistik sebesar 0.506669 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,6136 ( $>10\%$ ) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X1 (penduduk miskin) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (ketimpangan distribusi pendapatan).

Pengujian terhadap PDRB. Koefisien variabel PDRB adalah 0.091098 dengan t-statistik sebesar 6.464259 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (>5%) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X2 (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan distribusi pendapatan)

Pengujian terhadap Pengeluaran Pemerintah. Koefisien variabel Pengeluaran pemerintah adalah -0.038443 dan nilai t-statistik sebesar -6.394190 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (<5%) sehingga secara statistik menunjukkan variabel X3 (Pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan distribusi pendapatan)

### **Interpretasi dan Hasil**

Pada variabel X<sub>1</sub> (Jumlah penduduk miskin) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.005488 dan pada uji individu tidak signifikan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal. Tolak ukur kemiskinan tidak hanya diukur dari Jumlah penduduk miskin. BPS menggunakan 3 indikator kemiskinan yaitu *Head Count Indeks*, yaitu persentase atau jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. *Proverty Gap Indeks* / Indeks Kedalaman kemiskinan, yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Proverty Severity Indeks* / Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

(Todaro, 1998) Kemiskinan sering dimengerti hanya sebagai penyebab rendahnya pendapatan seseorang. Padahal kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan berbagai faktor. biasanya rendahnya kesejahteraan dijadikan ukuran kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh dalam peningkatan Ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar koefisien yang dimiliki.

Pada variabel X<sub>2</sub> (PDRB perkapita) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.091098 dan pada uji individu signifikan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal. Jadi apabila PDRB perkapita mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.091098. Maka apabila PDRB perkapita mengalami peningkatan maka akan semakin menambah ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di

provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.091098. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan Ani Nurlaili (2016), Susi Lestari (2016) dan Yeni Del Rosa, Ingara Sovita (2016) dimana variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Pada variabel X3 (Pengeluaran Pemerintah) yang memiliki nilai koefisien sebesar -0.038443 dan pada uji individu berpengaruh negatif dan signifikan, dimana hal ini sesuai dengan hipotesis awal. Jadi apabila Pengeluaran pemerintah naik 1% maka akan menurunkan angka Ketimpangan Distribusi pendapatan sebesar 0.038443. Maka dari itu jika jumlah Pengeluaran pemerintah semakin ditingkatkan maka Indeks Gini/Ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan akan menurun sebesar 0.038443. Dengan semakin besarnya pengeluaran pemerintah maka akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengeluaran pemerintah menjadi pendorong produktifitas unit-unit usaha di daerah tersebut karena output yang dihasilkan oleh industri besar maupun UKM (Usaha Kecil Mikro) akan lebih banyak terserap. Sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Dimas Wahyu Setyawan (2016), Syahida Syita (2017), Ketut Wahyu Dhyatmika(, Hastarini Dwi Atmanti (2013) dimana variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## **Kesimpulan**

Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti bahwa Jumlah penduduk miskin tidak dapat membuktikan keterkaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti bahwa PDRB dapat membuktikan keterkaitannya terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

### **Implikasi**

1) Untuk menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan saran penulis sebaiknya pemerintah membuat strategi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemecahan masalah ketimpangan serta kemiskinan, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat berpendapatan tinggi. 2) Berupaya berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur dan perbaikan sumber daya manusia terutama di daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah atau daerah di provinsi Sulawesi Selatan. 3) Besarnya pengeluaran pemerintah dalam alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dengan melakukan kebijakan dan pembangunan proyek strategis akan membantu menyerap output produksi. Sehingga akan meningkatkan produktivitas terutama sektor swasta baik itu UMKM maupun produsen sedang. yang akan berpacu untuk memenuhi permintaan dari masyarakat pelaksanaan proyek pemerintah. dan tentunya dengan tingginya produksi tersebut akan berpengaruh ke pendapatan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN.hal 11-20.
- Koncoro, Mudrajad., (1997). *Ekonomika Pembangunan* Edisi 4, Yogyakarta: STIE YKPN.hal 111-117.
- Dimas Wahyu Setyanwan. 2016.”Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014”. *Skrpsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Benu Olfy L Suzana dan Gene H M Kapantow. 2014.”Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara tahun 2005-2013”. *e jurnal*. Hal 21-32.
- Ilham Farih Muhaimin (2014), Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2007 – 2011. *Skripsi* sarjana jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.hal 37-40.
- Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* Edisi 4, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal 353-368.
- Todaro, Michel P dan Smit, Stephen P (2011). *Pembangunan Ekonomi* Edisi 11, Jakarta: Erlangga, hal 250-264.
- M.L Jhingan (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 20-36.
- Ani Nur Laili. 2016.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dipulau Jawa tahun 2007-2013”.*Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal 41-64.
- Galaxi Chrisamba dan Birgitta Dian Saraswati.2013.”Analisis ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia”.*Jurnal*.Universitas Kristen Satya Wacana. Hal 2-10.
- Yeni Del Rosa dan Ingra Sovita.2016.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.”*Jurnal*.Universitas Dharma Andalas Padang. Hal 1-12.
- Badan Pusat Statistik Database, diakses 20 Oktober 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan Database, diakses 12 Oktober 2017, dari <http://www.sulsel.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2015). “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia, (2010-2015)”, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2016). “Jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (2011-2015)”, Badan Pusat Statistik. Sulawesi .

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2016). “Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka,(2011-2016)” Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan.Makassar

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Database, diakses 2 November 2017, dari [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316)